



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P.
Jabatan : Kepala Biro Persidangan II

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suprihartini, S.IP., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

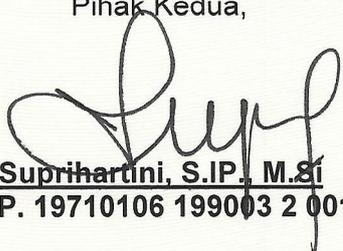
Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Suprihartini, S.IP., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001


Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P.
NIP. 19700706 199803 1 005



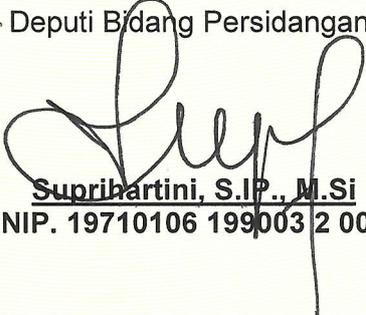
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terlaksananya Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan, Kerumahtangaan dan Penegakan Etik DPR | 1. Jumlah Penetapan Prolegnas | 2 Rekomendasi |
| | | 2. Jumlah kegiatan sosialisasi UU yang dilaksanakan | 1160 Kegiatan |
| | | 3. Jumlah Penyusunan dan Pembahasan RUU Usul DPR | 6 RUU |
| | | 4. Jumlah Pembahasan RUU Usul Pemerintah | 11 RUU |
| | | 5. Jumlah Pembahasan RUU Kumulatif Terbuka | 14 RUU |
| 2. | Tersedianya APBN bagi penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola | 1. Jumlah rekomendasi kebijakan anggaran mitra kerja DPR RI | 49 rekomendasi |
| 3. | Terselenggaranya Fungsi Pengawasan DPR terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah yang berkualitas | 1. Jumlah rekomendasi kebijakan hasil pengawasan | 5 rekomendasi |
| 4. | Meningkatnya Kualitas Dukungan Persidangan Badan Mahkamah dan Panitia Khusus | 1. Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | 100% |
| | | 2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan II | 3,35 |
| | | 3. Nilai IKPA Mini Biro Persidangan II | 96 |
| | | - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output | 9,60 19,20 24,00 14,40 28,80 |
| 4. | Persentase Realisasi Anggaran | 98% | |

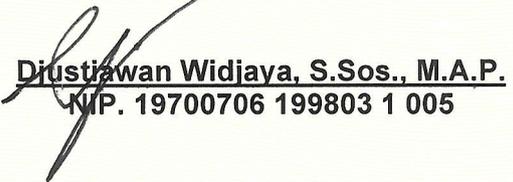


| Program | Anggaran |
|--|----------------------|
| Satker Dewan | Rp178.908.419.000,00 |
| Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI dan Alat Kelengkapan Dewan | Rp178.908.419.000,00 |
| Satker Setjen | Rp2.937.541,000.00 |
| Program Dukungan Manajemen | Rp2.937.541,000.00 |

Deputi Bidang Persidangan,


Suprihartini, S.IP., M.Si
NIP. 19710106 199003 2 001

Jakarta, 8 Januari 2025
Kepala Biro Persidangan II,


Djusriawan Widjaya, S.Sos., M.A.P.
NIP. 19700706 199803 1 005

